



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
5. Bagian dari hasil retribusi daerah adalah dana bagian dari hasil retribusi daerah kabupaten yang dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Dana bagian hasil retribusi daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan pemberian dana bagian hasil retribusi daerah adalah :
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

BAB III
SASARAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN HASIL
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Sasaran dana bagian hasil retribusi daerah adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

Pasal 4

Pengalokasian dana bagian hasil retribusi daerah dibagi merata kepada setiap desa.

BAB IV
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN SERTA
PENGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Perhitungan dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Penyediaan dana bagian hasil retribusi daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Minahasa.
- (2) Penganggaran dana bagian hasil retribusi daerah ditata dalam mata anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.
- (3) Teknis administrasi pelaksanaan dana bagian hasil retribusi daerah dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

Pasal 7

- (1) Pengajuan dana bagian hasil retribusi daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melampirkan beberapa persyaratan.
- (2) Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. Surat Pengajuan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, dengan persetujuan Camat;
 - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagian Hasil Retribusi Daerah; dan
 - d. Fotokopi buku tabungan rekening kas desa di Bank Sulutgo Cabang Tondano.

Pasal 8

Dana bagian hasil retribusi daerah akan disalurkan setelah seluruh persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 9

Penyaluran dana bagian hasil pajak dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 10

Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana bagian hasil retribusi daerah, seperti :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
 - a. Biaya penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. Biaya penyusunan tata ruang desa;
 - c. Biaya pengelolaan informasi desa;
 - d. Biaya penyelenggaraan kerjasama antar desa;
 - e. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
2. Bidang Pembangunan Desa, antara lain :

a. Pembangunan .

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - e. Pelestarian lingkungan hidup.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain :
 - a. Biaya pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. Pembinaan lembaga adat;
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - g. Pemberian bantuan sosial; dan
 - h. Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :
 - a. Biaya pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan studi banding bagi Hukum Tua, perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan pengurus Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Biaya pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. Biaya pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - d. Biaya peningkatan kapasitas masyarakat;
 - e. Biaya pengelolaan perpustakaan desa;
 - f. Biaya pengelolaan PAUD;
 - g. Biaya pengelolaan posyandu; dan
 - h. Penyertaan modal BUM Desa.

Pasal 11

Dana bagian hasil retribusi daerah tidak dapat digunakan untuk :

- a. membiayai penghasilan tetap hukum tua dan perangkat desa;
- b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- c. membangun sarana publik dalam skala besar, termasuk pembangunan/perbaikan kantor/balai desa.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan dana bagian hasil retribusi daerah dalam APB Desa kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan sepengetahuan Camat.

BAB VI 

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, berupa :
 - a. Memberikan pedoman, pembinaan dan pendampingan serta memfasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan desa;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan dan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa pemberian bimbingan dan verifikasi administrasi pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat, berupa :
 - a. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa.
- (5) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan kegiatan, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang.

Pasal 14

- (1) Desa yang dianggap berprestasi dalam penggunaan dana bagian hasil retribusi daerah akan diberi penghargaan.
- (2) Desa yang penggunaan dananya tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi.
- (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano

pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 NOMOR 16

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa

Nomor : 16 TAHUN 2018

Tanggal : 15 JANUARI 2018

Tentang : Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018

**PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN
1.	Eris	1 Telap	13,575,355	13,575,000
		2 Watumea	13,575,355	13,575,000
		3 Eris	13,575,355	13,575,000
		4 Maumbi	13,575,355	13,575,000
		5 Tandengan	13,575,355	13,575,000
		6 Ranomerut	13,575,355	13,575,000
		7 Touliang Oki	13,575,355	13,575,000
		8 Tandengan Satu	13,575,355	13,575,000
2.	Kombi	9 Tulap	13,575,355	13,575,000
		10 Lalumpe	13,575,355	13,575,000
		11 Kayubesi	13,575,355	13,575,000
		12 Ranowangko II	13,575,355	13,575,000
		13 Kombi	13,575,355	13,575,000
		14 Sawangan	13,575,355	13,575,000
		15 Kolongan	13,575,355	13,575,000
		16 Rerer	13,575,355	13,575,000
		17 Kinaleosan	13,575,355	13,575,000
		18 Makalisung	13,575,355	13,575,000
		19 Kalawiran	13,575,355	13,575,000
		20 Kolongan I	13,575,355	13,575,000
		21 Rerer I	13,575,355	13,575,000
3.	Lembean Timur	22 Kapataran	13,575,355	13,575,000
		23 Seretan	13,575,355	13,575,000
		24 Atep Oki	13,575,355	13,575,000
		25 Karor	13,575,355	13,575,000
		26 Kaleosan	13,575,355	13,575,000
		27 Watulaney	13,575,355	13,575,000
		28 Kayuroya	13,575,355	13,575,000
		29 Seretan Timu	13,575,355	13,575,000
		30 Parentek	13,575,355	13,575,000
		31 Kapataran I	13,575,355	13,575,000
		32 Watulaney Amian	13,575,355	13,575,000
4.	Kakas	33 Kayuwatu	13,575,355	13,575,000
		34 Wineru	13,575,355	13,575,000
		35 Rinondor	13,575,355	13,575,000
		36 Sendangan	13,575,355	13,575,000
		37 Pahaleten	13,575,355	13,575,000
		38 Talikuran	13,575,355	13,575,000
		39 Tounelet	13,575,355	13,575,000
		40 Paslaten	13,575,355	13,575,000
		41 Kaweng	13,575,355	13,575,000
		42 Toulimembet	13,575,355	13,575,000
		43 Makalelon	13,575,355	13,575,000
		44 Tumpaan	13,575,355	13,575,000
		45 Mahembang	13,575,355	13,575,000
5.	Tompaso	46 Tember	13,575,355	13,575,000
		47 Kamanga	13,575,355	13,575,000
		48 Sendangan	13,575,355	13,575,000
		49 Talikuran	13,575,355	13,575,000
		50 Tempok	13,575,355	13,575,000

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN
		51 Liba	13,575,355	13,575,000
		52 Tolok	13,575,355	13,575,000
		53 Kamanga II	13,575,355	13,575,000
		54 Tempok Selatan	13,575,355	13,575,000
		55 Tolok Satu	13,575,355	13,575,000
6.	Remboken	56 Kasuratan	13,575,355	13,575,000
		57 Parepei	13,575,355	13,575,000
		58 Pulutan	13,575,355	13,575,000
		59 Sinuian	13,575,355	13,575,000
		60 Kaima	13,575,355	13,575,000
		61 Sendangan	13,575,355	13,575,000
		62 Timu	13,575,355	13,575,000
		63 Talikuran	13,575,355	13,575,000
		64 Tampusu	13,575,355	13,575,000
		65 Paslaten	13,575,355	13,575,000
		66 Leleko	13,575,355	13,575,000
7.	Langowan Timur	67 Wolaang	13,575,355	13,575,000
		68 Teep	13,575,355	13,575,000
		69 Karondoran	13,575,355	13,575,000
		70 Waleure	13,575,355	13,575,000
		71 Amongena I	13,575,355	13,575,000
		72 Amongena II	13,575,355	13,575,000
		73 Sumarayar	13,575,355	13,575,000
		74 Amongena III	13,575,355	13,575,000
8.	Langowan Barat	75 Koyawas	13,575,355	13,575,000
		76 Walewangko	13,575,355	13,575,000
		77 Noongan	13,575,355	13,575,000
		78 Raringis	13,575,355	13,575,000
		79 Ampreng	13,575,355	13,575,000
		80 Tumaratas	13,575,355	13,575,000
		81 Paslaten	13,575,355	13,575,000
		82 Lowian	13,575,355	13,575,000
		83 Tounelet	13,575,355	13,575,000
		84 Kopiwangker	13,575,355	13,575,000
		85 Noongan Dua	13,575,355	13,575,000
		86 Noongan Tiga	13,575,355	13,575,000
		87 Tumaratas Dua	13,575,355	13,575,000
		88 Raranon	13,575,355	13,575,000
		89 Raringis Utara	13,575,355	13,575,000
		90 Raringis Selatan	13,575,355	13,575,000
9.	Sonder	91 Leilem	13,575,355	13,575,000
		92 Kolongan Atas	13,575,355	13,575,000
		93 Tounelet	13,575,355	13,575,000
		94 Talikuran	13,575,355	13,575,000
		95 Kauneran	13,575,355	13,575,000
		96 Sendangan	13,575,355	13,575,000
		97 Rambunan	13,575,355	13,575,000
		98 Sawangan	13,575,355	13,575,000
		99 Tincep	13,575,355	13,575,000
		100 Timbukar	13,575,355	13,575,000
		101 Leilem Dua	13,575,355	13,575,000
		102 Leilem Tiga	13,575,355	13,575,000
		103 Kolongan Atas Dua	13,575,355	13,575,000
		104 Kauneran Satu	13,575,355	13,575,000
		105 Rambunan Amian	13,575,355	13,575,000
		106 Sendangan Satu	13,575,355	13,575,000
		107 Talikuran Satu	13,575,355	13,575,000
		108 Tounelet Satu	13,575,355	13,575,000
		109 Kolongan Atas Satu	13,575,355	13,575,000

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN		
10.	Kawangkoan	110 Tondegesean	13,575,355	13,575,000		
		111 Kanonang III	13,575,355	13,575,000		
		112 Tondegesean I	13,575,355	13,575,000		
		113 Tondegesean II	13,575,355	13,575,000		
11.	Pineleng	114 Pineleng I	13,575,355	13,575,000		
		115 Pineleng II	13,575,355	13,575,000		
		116 Sea I	13,575,355	13,575,000		
		117 Sea II	13,575,355	13,575,000		
		118 Winangun Atas	13,575,355	13,575,000		
		119 Warembungan	13,575,355	13,575,000		
		120 Sea	13,575,355	13,575,000		
		121 Kali	13,575,355	13,575,000		
		122 Kali Selatan	13,575,355	13,575,000		
		123 Pineleng Dua Indah	13,575,355	13,575,000		
		124 Lotta	13,575,355	13,575,000		
		125 Sea Mitra	13,575,355	13,575,000		
		126 Sea Tumpengan	13,575,355	13,575,000		
		127 Pineleng Satu Timur	13,575,355	13,575,000		
12.	Tombulu	128 Kembes II	13,575,355	13,575,000		
		129 Kembes I	13,575,355	13,575,000		
		130 Tombuluan	13,575,355	13,575,000		
		131 Koka	13,575,355	13,575,000		
		132 Suluan	13,575,355	13,575,000		
		133 Kamangta	13,575,355	13,575,000		
		134 Sawangan	13,575,355	13,575,000		
		135 Rumengkor	13,575,355	13,575,000		
		136 Tikela	13,575,355	13,575,000		
		137 Rumengkor Satu	13,575,355	13,575,000		
		138 Rumengkor Dua	13,575,355	13,575,000		
		13.	Tombariri	139 Kumu	13,575,355	13,575,000
				140 Teling	13,575,355	13,575,000
				141 Poopoh	13,575,355	13,575,000
142 Ranowangko	13,575,355			13,575,000		
143 Senduk	13,575,355			13,575,000		
144 Pinasungkulan	13,575,355			13,575,000		
145 Mokupa	13,575,355			13,575,000		
146 Sarani Matani	13,575,355			13,575,000		
147 Borgo	13,575,355			13,575,000		
148 Tambala	13,575,355			13,575,000		
14.	Tondano Utara	149 Tonsea Lama	13,575,355	13,575,000		
		150 Kembuan	13,575,355	13,575,000		
		151 Kembuan Satu	13,575,355	13,575,000		
15.	Langowan Selatan	152 Palamba	13,575,355	13,575,000		
		153 Atep	13,575,355	13,575,000		
		154 Manembo	13,575,355	13,575,000		
		155 Temboan	13,575,355	13,575,000		
		156 Rumbia	13,575,355	13,575,000		
		157 Winebetan	13,575,355	13,575,000		
		158 Kaayuran Atas	13,575,355	13,575,000		
		159 Kaayuran Bawah	13,575,355	13,575,000		
		160 Kawatak	13,575,355	13,575,000		
		161 Atep Satu	13,575,355	13,575,000		
		16.	Langowan Utara	162 Walantakan	13,575,355	13,575,000
				163 Taraitak	13,575,355	13,575,000
				164 Karumenga	13,575,355	13,575,000
				165 Toraget	13,575,355	13,575,000
166 Tempang	13,575,355			13,575,000		
167 Tempang II	13,575,355			13,575,000		
168 Tempang III	13,575,355			13,575,000		
169 Taraitak Satu	13,575,355			13,575,000		

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN
17.	Kakas Barat	170 Wasian	13,575,355	13,575,000
		171 Panasen	13,575,355	13,575,000
		172 Tountimomor	13,575,355	13,575,000
		173 Totolan	13,575,355	13,575,000
		174 Passo	13,575,355	13,575,000
		175 Kalawiran	13,575,355	13,575,000
		176 Touliang	13,575,355	13,575,000
		177 Simbel	13,575,355	13,575,000
		178 Wailang	13,575,355	13,575,000
		179 Bukit Tinggi	13,575,355	13,575,000
18.	Kawangkoan Utara	180 Kiawa Satu	13,575,355	13,575,000
		181 Kiawa Satu Utara	13,575,355	13,575,000
		182 Kiawa Satu Barat	13,575,355	13,575,000
		183 Kiawa Dua	13,575,355	13,575,000
		184 Kiawa Dua Timur	13,575,355	13,575,000
		185 Kiawa Dua Barat	13,575,355	13,575,000
19.	Kawangkoan Barat	186 Kayuwi	13,575,355	13,575,000
		187 Kayuwi Satu	13,575,355	13,575,000
		188 Kanonang Satu	13,575,355	13,575,000
		189 Kanonang Dua	13,575,355	13,575,000
		190 Kanonang Empat	13,575,355	13,575,000
		191 Kanonang Lima	13,575,355	13,575,000
		192 Tombasian Atas	13,575,355	13,575,000
		193 Tombasian Atas Satu	13,575,355	13,575,000
		194 Tombasian Bawah	13,575,355	13,575,000
		195 Ranolambot	13,575,355	13,575,000
20.	Mandolang	196 Kalasey Satu	13,575,355	13,575,000
		197 Kalasey Dua	13,575,355	13,575,000
		198 Tateli	13,575,355	13,575,000
		199 Tateli Weru	13,575,355	13,575,000
		200 Tateli Satu	13,575,355	13,575,000
		201 Tateli Dua	13,575,355	13,575,000
		202 Tateli Tiga	13,575,355	13,575,000
		203 Koha	13,575,355	13,575,000
		204 Koha Barat	13,575,355	13,575,000
		205 Koha Timur	13,575,355	13,575,000
		206 Koha Selatan	13,575,355	13,575,000
		207 Agotey	13,575,355	13,575,000
		21.	Tombariri Timur	208 Lemoh
209 Lemoh Barat	13,575,355			13,575,000
210 Lemoh Timur	13,575,355			13,575,000
211 Lemoh Uner	13,575,355			13,575,000
212 Lolah	13,575,355			13,575,000
213 Lolah Satu	13,575,355			13,575,000
214 Lolah Dua	13,575,355			13,575,000
215 Lolah Tiga	13,575,355			13,575,000
216 Ranotongkor	13,575,355			13,575,000
217 Ranotongkor Timur	13,575,355			13,575,000
22.	Tompaso Barat	218 Pinaesaan	13,575,355	13,655,500
		219 Tompaso II	13,575,355	13,575,000
		220 Tompaso II Utara	13,575,355	13,575,000
		221 Pinabetengan Utara	13,575,355	13,575,000
		222 Pinabetengan	13,575,355	13,575,000
		223 Pinabetengan Selatan	13,575,355	13,575,000
		224 Tonsewer	13,575,355	13,575,000
		225 Tonsewer Selatan	13,575,355	13,575,000
		226 Touure	13,575,355	13,575,000
		227 Touure Dua	13,575,355	13,575,000
JUMLAH			3,081,605,500	3,081,605,500

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW